

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dunia kerja yang berkembang sangat pesat saat ini, seluruh instansi pemerintahan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yang dapat dinilai berdasarkan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Untuk menjalankan kegiatan pelayanan, tidak hanya diperlukan peran pemimpin, tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM).

Faktor SDM bukan hanya merupakan sekedar alat saja, tetapi sangat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan menentukan keberhasilan suatu instansi pemerintah untuk mencapai tujuannya, terlebih instansi pemerintah yang bertugas untuk melayani masyarakat luas. Berbicara tentang SDM tidak terlepas dari yang namanya pegawai, karena pegawai merupakan manusia yang memiliki hakekat sebagai makhluk individu dan sosial. Kinerja suatu instansi sangat tergantung pada kualitas warga instansi dan kualitas dari semua unit-unit yang ada dalam instansi tersebut. Sumber Daya Manusia perlu dikembangkan secara terus menerus agar diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti yang sebenarnya, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki. Berkualitas bukan hanya pandai saja, tapi dapat memenuhi semua syarat kualitatif yang dituntut pekerjaan itu, sehingga pekerjaan itu benar-benar dapat diselesaikan sesuai rencana.

Tanah mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah, dan dapat dikatakan hampir semua

kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Sebagai contohnya, tanah dapat dijadikan sebagai harta atau aset untuk masa depan. Fungsi pokok tanah dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai tempat hidup dan melestarikan kehidupan mereka.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah, diperlukan lembaga yang berhak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, sehingga akan lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap setiap gangguan pihak lain. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tingkat Pusat dan Kantor Pertanahan untuk tingkat Daerah. Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT merupakan organisasi publik yang berwenang menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pertanahan.

Adapun Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. BPN sebagai organisasi publik, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas kinerja. Hal ini diperlukan mengingat tujuan pelayanan pada dasarnya adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat, melalui kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat. Pada era manajemen berbasis kinerja organisasi sektor publik, perlu dibangunnya sistem manajemen organisasi sektor publik yang berbasis kinerja (*performance based management*) demi kepentingan masyarakat.

Pengukuran kualitas kinerja pegawai BPN Provinsi NTT, khususnya pada Bidang Hukum Kepegawaian dan Organisasi, dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja, yang diperoleh instansi, tim atau individu. Pengukuran kualitas kinerja pegawai Bidang Hukum Kepegawaian dan Organisasi akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kualitas kinerja, perencanaan, dan proses pelaksanaan kualitas kinerja. Atas dasar pengukuran kualitas kinerja Bidang Hukum Kepegawaian dan Organisasi inilah, dapat diambil langkah-langkah untuk melakukan perbaikan kinerja di waktu yang akan datang, karena pengukuran atau evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat, perilaku seseorang, dan prestasi kerja individu, kelompok / tim dan organisasi, sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil dalam organisasi.

Pengaruh kualitas kinerja individu maupun tim, terhadap kualitas kinerja organisasi dapat diuraikan sebagai berikut: 1) faktor kualitas kinerja individual dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan, motivasi, dan peran; 2) faktor kualitas kinerja tim atau kelompok dipengaruhi oleh keeratan tim, kepemimpinan, kekompakan struktur tim, peran tim dan norma; 3) faktor kualitas kinerja organisasi dipengaruhi oleh lingkungan, kepemimpinan, struktur organisasi pilihan strategi, teknologi, kultur organisasi dan proses organisasi. Oleh karena itu, untuk mengukur kualitas kinerja sangat berhubungan dengan beberapa determinan penting ini, antara lain: a) masukan (*input*), terdiri atas ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan ketersediaan prasarana, b) aktivitas (*process*) terdiri atas birokrasi, disiplin kerja,

dan c) keluaran (*output*) merupakan hasil langsung dari suatu proses atau target pencapaian program.

Berdasarkan uraian dan penerapan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap "**Analisis Kualitas Kerja Pegawai Bidang Hukum Kepegawaian dan Organisasi Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kualitas Kerja Pegawai Bidang Hukum Kepegawaian dan Organisasi Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi Kualitas Kerja Pegawai Bidang Hukum Kepegawaian dan Organisasi Badan Pertanahan Provinsi NTT?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kualitas Kerja Pegawai Bidang Hukum Kepegawaian dan Organisasi Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, dan
2. Untuk mengetahui faktor apasaja yang mempengaruhi Kualitas Kerja Pegawai Pada Bidang Hukum Kepegawaian dan Organisasi Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT.

1.4. Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya keilmuan penulis dalam menganalisis Kualitas Kerja Pegawai Bidang Hukum Kepegawaian dan Organisasi Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT.

1.1.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, juga untuk menambah pengetahuan tentang Kualitas Kerja Pegawai Bidang Hukum Kepegawaian dan Organisasi Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT.

b. Bagi Peneliti Lain

Penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi bahan referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya, untuk mau meneliti aspek-aspek lain yang terdapat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT.

c. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, serta memberikan referensi bahan penelitian bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik.